

ABSTRAK

Ibu Kota Negara memiliki peran krusial dalam menjalankan segala urusan administratif terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Badan Otorita yang disebut Otorita Ibu Kota Nusantara akan mengawasi proses ini. Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, Otorita telah dikenal sebelumnya. Penelitian ini bertujuan membandingkan Otorita IKN, Otorita Batam, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal posisi, wewenang, tugas, tujuan, serta implementasi kebijakan mereka.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif yang didukung oleh data sekunder, termasuk bahan hukum primer seperti UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, serta berbagai jurnal dan literatur hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otorita IKN, Otorita Batam, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki perbedaan signifikan dalam hal posisi, tugas, fungsi, wewenang, dan peran sebagai pemimpin daerah. Ini disebabkan oleh fokus utama masing-masing entitas; Otorita IKN berfokus pada pembangunan infrastruktur di Ibu Kota yang baru, Otorita Batam berfokus pada penguatan ekonomi di Batam, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berfokus pada peran sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan di Indonesia. Perbedaan ini juga tercermin dalam implementasi kebijakan mereka, di mana Otorita IKN lebih memfokuskan pada transisi dan pembangunan infrastruktur baru untuk mendukung pemindahan ibu kota ke lokasi baru, sementara Otorita Batam lebih menekankan pertumbuhan ekonomi melalui insentif investasi, peningkatan infrastruktur, dan perbaikan prosedur bisnis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan kompleks terkait dengan masalah kota besar dan berusaha meningkatkan layanan publik, infrastruktur transportasi, serta kualitas hidup penduduknya.

Dengan demikian, masing-masing entitas berusaha mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan khusus wilayah yang mereka kelola, dengan fokus yang berbeda-beda.

Kata kunci: Ibu Kota Negara, Otorita, Pemerintahan Daerah

ABSTRACT

The State Capital has a crucial role in carrying out all administrative matters related to the relocation of the new State Capital in accordance with Law Number 3 of 2022 on the State Capital. An Authority Body called the Nusantara Capital Authority or Authority IKN will oversee this process. In the context of Indonesia's constitutional system, the Authority has been recognized before. This research aims to compare Authority IKN, Authority Batam, and the Provincial Government of DKI Jakarta in terms of their position, authority, duties, objectives, and policy implementation.

The research method used is a normative juridical approach with descriptive analysis supported by secondary data, including primary legal materials such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 3 of 2022 on IKN, Law No. 23 of 2004 on Regional Government, Law No. 29 of 2007 on the Provincial Government of DKI Jakarta, and Presidential Decree No. 41 of 1973 on the Batam Island Industrial Area, as well as various journals and legal literature.

The results show that the Authority IKN, Authority Batam, and DKI Jakarta Provincial Government have significant differences in terms of their positions, duties, functions, authorities, and roles as regional leaders. This is due to the main focus of each entity; Authority IKN focuses on infrastructure development in the new capital city, Authority Batam focuses on strengthening the economy in Batam, and the DKI Jakarta Provincial Government focuses on its role as the centre of government, economy, and culture in Indonesia. These differences are also reflected in their policy implementation, with the Authority IKN focusing more on transition and new infrastructure development to support the relocation of the capital city to its new location, while the Authority Batam emphasizes economic growth through investment incentives, infrastructure improvements, and improved business procedures. The Provincial Government of DKI Jakarta faces complex challenges related to big city issues and seeks to improve public services, transportation infrastructure and the quality of life of its residents.

As such, each entity tries to implement policies according to the specific needs of the areas they manage, with different focuses.

Keyword: Authority, Capital City, Regional Government